

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi, 2) Untuk mengetahui apa saja yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan dalam menjalankan kewenangan melakukan penahanan. Rumusan masalah yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan di Provinsi Jambi?, 2) Apa saja yang yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam menjalankan kewenangan melakukan penahanan?. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat. Sumber data dalam skripsi ini di ambil dari: 1) Data primer, penelitian dilakukan di Kota Jambi yaitu di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPHLHK) Brigade Sporc Harimau Jambi, 2) Data sekunder, melalui penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kasi Korwas Polda Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengaturan Pelaksanaan Penyidik pegawai negeri sipil kehutanan dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana terhadap hutan berdasarkan peraturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 2) Hal yang ditemukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan Brigade Sporc Harimau Jambi dalam dalam Menjalankan Kewenangan Melakukan penahanan adalah, Sulitnya melacak dan menemukan keberadaan tersangka, sulitnya menemukan barang bukti, dan kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *PPNS; Kehutanan; Penahanan*

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out the arrangements for implementing the authority of Forestry Civil Servants Investigators in detaining perpetrators of forestry crimes in Jambi Province, 2) To find out what forestry Civil Servants Investigators found in exercising their authority to make arrests. The formulation of the problem that will be the subject of discussion in writing this research are: 1) How is the regulation of the implementation of the authority of Forestry Civil Servants Investigators in detaining perpetrators of forestry crimes in Jambi Province?, 2) What are found by Forestry Civil Servant Investigators? in carrying out the authority to make detention? The research method in this thesis is empirical juridical. This type of empirical juridical research, or what is called field research, is to study the applicable legal provisions and what actually happens in society. Sources of data in this thesis were taken from: 1) Primary data, research was conducted in Jambi City, namely at the Office of the Security and Law Enforcement Agency for Environment and Forestry (PPHLHK) Jambi Tiger Sporc Brigade, 2) Secondary data, through research at the Directorate of Criminal Investigation Special (Direskrimsus) Kasi Korwas Jambi Police. The results of the study show that: 1) Implementation arrangements for forestry civil servant investigators in detaining perpetrators of forest crimes based on legal regulations, namely Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction . 2) Things that were found by the Jambi Tiger Sporc Brigade Civil Servant Investigators in the Jambi Tigers in Exercising their Authority to make arrests were, The difficulty of tracking down and finding the whereabouts of suspects, the difficulty of finding evidence, and the lack of concern and legal awareness of the community.

Keywords: PPNS; Forestry; Detention